

## Research Article

# The Role of West Java Islamic Organizations in Determining the Direction of Political Policy in West Java (Case Study of the Persatuan Ummat Islam Organization)

**Muhamad Ma'sum**

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: [masummuhamad0610@gmail.com](mailto:masummuhamad0610@gmail.com)

Copyright © 2026 by Authors, Published by Annujum: Journal of Humaniora and Law.

Received : November 16, 2025

Revised : Desember 9, 2025

Accepted : January 20, 2026

Available online : January 27, 2026

**How to Cite:** Muhamad Ma'sum. (2026). The Role of West Java Islamic Organizations in Determining the Direction of Political Policy in West Java (Case Study of the Persatuan Ummat Islam Organization). *Annujum: Journal of Humaniora and Law*, 2(1), 11-16. <https://doi.org/10.63738/annujum.v2i1.23>

### Abstract

The development of democracy in Indonesia has been marked by the increasing role of non-state actors in political processes, including religious-based mass organizations. From the perspective of political science, religious organizations constitute an integral part of civil society and possess the capacity to influence public policy through social and moral legitimacy. West Java, as a province with a strong religious and social base, represents a strategic arena for the activities of Islamic organizations, one of which is Persatuan Ummat Islam (PUI). This study aims to analyze the role of the Islamic organization PUI in shaping the direction of political policy in West Java. The research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and observation. The findings indicate that PUI functions as a non-formal political actor by engaging in policy advocacy, political communication, and the construction of public moral discourse. These findings confirm that Islamic mass organizations constitute an important element of local democracy in Indonesia.

**Keywords:** Islamic Organizations, PUI, Political Policy, Civil Society, West Java.

**Kiprah Ormas Islam Jawa Barat dalam Menentukan Arah Kebijakan Politik di Jawa Barat (Studi Kasus pada Ormas Persatuan Ummat Islam)**

### Abstrak

Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan meningkatnya peran aktor non-negara dalam proses politik, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dalam perspektif ilmu politik, ormas keagamaan merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki kapasitas

# The Role of West Java Islamic Organizations in Determining the Direction of Political Policy in West Java (Case Study of the Persatuan Ummat Islam Organization)

Muhamad Ma'sum

memengaruhi kebijakan publik melalui legitimasi sosial dan moral. Jawa Barat sebagai provinsi dengan basis sosial keagamaan yang kuat menjadi ruang strategis bagi kiprah ormas Islam, salah satunya Persatuan Ummat Islam (PUI). Penelitian ini bertujuan menganalisis kiprah Ormas Islam PUI dalam menentukan arah kebijakan politik di Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUI berperan sebagai aktor politik nonformal melalui advokasi kebijakan, komunikasi politik, dan pembentukan wacana moral publik. Temuan ini menegaskan bahwa ormas Islam merupakan elemen penting dalam demokrasi lokal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Ormas Islam, PUI, Kebijakan Politik, Civil Society, Jawa Barat.

## PENDAHULUAN

Demokrasi tidak hanya bergantung pada institusi formal seperti partai politik dan parlemen, tetapi juga pada kekuatan masyarakat sipil. Dalam kajian klasik ilmu politik, masyarakat sipil dipahami sebagai ruang sosial yang berada di antara negara dan warga negara. Tocqueville menegaskan bahwa “associations are schools of democracy” yang memungkinkan warga belajar partisipasi politik secara kolektif (Tocqueville, 1835/2000, p. 517).

Dalam konteks Indonesia, ormas Islam merupakan bagian penting dari masyarakat sipil. Ramlan Surbakti (2010) menyatakan bahwa “organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai saluran artikulasi dan agregasi kepentingan di luar partai politik” (hlm. 164). Dengan demikian, peran ormas Islam tidak dapat dilepaskan dari analisis politik, terutama dalam konteks kebijakan publik di tingkat lokal.

Jawa Barat memiliki karakter sosial-keagamaan yang kuat dan menjadi wilayah strategis bagi peran ormas Islam. Salah satu ormas yang memiliki akar historis dan pengaruh sosial signifikan adalah Persatuan Ummat Islam (PUI). PUI tidak hanya bergerak di bidang dakwah dan pendidikan, tetapi juga berperan dalam menyampaikan aspirasi umat kepada pemerintah daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik tidak selalu berlangsung dalam arena elektoral, melainkan juga dalam ruang sosial-keagamaan yang bersifat nonformal. Sebagaimana ditegaskan oleh Almond dan Verba (1963), “the political system is embedded in a pattern of orientations to political action” (p. 14). Orientasi politik masyarakat Jawa Barat banyak dipengaruhi oleh otoritas keagamaan, sehingga kiprah PUI menjadi relevan untuk dikaji secara ilmiah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, proses, dan dinamika kekuasaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Creswell (2014) menyatakan bahwa “qualitative research is best suited for exploring complex social phenomena within their natural settings” (p. 44).

Studi kasus dipilih untuk menggali secara mendalam peran PUI sebagai aktor politik nonformal di Jawa Barat. Yin (2018) menegaskan bahwa “case study research is appropriate when the researcher seeks to understand a real-life phenomenon in depth” (p. 15). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus

PUI dan pejabat pemerintah daerah, studi dokumentasi, serta observasi terhadap aktivitas organisasi.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi dengan menggunakan kerangka teori civil society dan partisipasi politik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persatuan Ummat Islam (PUI) menjalankan peran politiknya terutama melalui jalur nonformal yang berakar pada legitimasi moral, otoritas keagamaan, serta jejaring sosial yang telah terbangun secara historis di tengah masyarakat Jawa Barat. PUI tidak memosisikan dirinya sebagai aktor politik elektoral yang terlibat langsung dalam kontestasi kekuasaan formal, seperti pemilihan umum atau dukungan terbuka terhadap partai politik tertentu. Sebaliknya, organisasi ini memilih strategi politik yang lebih subtil dan berbasis nilai, yakni dengan membangun pengaruh melalui advokasi moral, komunikasi politik berbasis etika keagamaan, serta pembentukan opini publik yang berorientasi pada kepentingan umat. Pola ini menunjukkan bahwa praktik politik PUI lebih menekankan pada upaya memengaruhi proses kebijakan publik secara tidak langsung, namun berkelanjutan, melalui pendekatan sosial-keagamaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimiliki oleh PUI tidak bersifat koersif atau represif sebagaimana kekuasaan negara, melainkan lebih mendekati konsep *soft power*. Joseph S. Nye (2004) mendefinisikan *soft power* sebagai “the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments” (p. 5). Definisi ini relevan untuk menjelaskan bagaimana PUI bekerja dalam ruang politik lokal Jawa Barat. Daya tarik PUI tidak terletak pada kemampuan memaksa atau memberikan insentif material, melainkan pada otoritas moral, kredibilitas sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas organisasi dan para tokohnya. Melalui ceramah keagamaan, lembaga pendidikan, dan aktivitas sosial, PUI membangun narasi moral yang secara perlahan membentuk preferensi politik masyarakat dan, pada akhirnya, memengaruhi sikap serta keputusan para pengambil kebijakan di tingkat daerah.

Keberadaan PUI sebagai aktor politik nonformal memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam sistem politik tidak semata-mata terpusat pada institusi negara atau elite politik formal. Kekuasaan juga tersebar dalam jaringan sosial, nilai budaya, dan otoritas moral yang hidup di masyarakat. Dalam banyak kasus, rekomendasi atau sikap PUI terhadap isu-isu publik—seperti pendidikan keagamaan, kebijakan sosial, atau moralitas publik—menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses kebijakan publik di Jawa Barat tidak sepenuhnya bersifat teknokratis, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan normatif dan kultural yang dimediasi oleh ormas Islam seperti PUI.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, PUI menjalankan fungsi kontrol dan mediasi antara masyarakat dan negara. Peran ini sejalan dengan pandangan Robert D. Putnam (1993) yang menegaskan bahwa “networks of civic engagement

foster norms of reciprocity and trust" (p. 171). Jaringan pendidikan dan dakwah yang dimiliki PUI—mulai dari pesantren, madrasah, hingga majelis taklim—berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat posisi tawar organisasi ini dalam relasinya dengan pemerintah daerah. Modal sosial tersebut tidak hanya berupa jumlah anggota atau luasnya jaringan kelembagaan, tetapi juga tingkat kepercayaan sosial yang tinggi dari masyarakat terhadap PUI sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai keumatan.

Kepercayaan sosial ini menjadi sumber legitimasi politik yang sangat penting. Dalam banyak situasi, pemerintah daerah membutuhkan dukungan moral dari ormas Islam untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi kebijakan. PUI, melalui jaringan dan otoritasnya, mampu berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan agenda pemerintah. Mediasi ini tidak selalu dilakukan secara formal melalui mekanisme institusional, tetapi sering kali berlangsung melalui komunikasi informal, dialog personal, dan forum-forum keagamaan yang memiliki pengaruh luas terhadap opini publik. Dengan demikian, PUI tidak hanya berfungsi sebagai pengkritik kebijakan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam proses pembangunan daerah.

Lebih jauh, fungsi kontrol yang dijalankan oleh PUI tidak selalu diwujudkan dalam bentuk oposisi terbuka terhadap pemerintah. Kontrol sosial yang dilakukan PUI cenderung bersifat normatif dan persuasif, yakni dengan mengingatkan pemerintah terhadap nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kepentingan umat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kritik politik tidak selalu harus bersifat konfrontatif. Dalam konteks budaya politik Jawa Barat yang relatif religius dan menjunjung harmoni sosial, pendekatan persuasif justru sering kali lebih efektif dalam memengaruhi kebijakan publik.

Dari perspektif partisipasi politik, peran PUI mencerminkan apa yang disebut Almond dan Verba (1963) sebagai *non-conventional political participation*. Dalam kerangka ini, partisipasi politik tidak terbatas pada aktivitas elektoral seperti memilih atau menjadi anggota partai politik, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial dan keagamaan yang memiliki dampak politik. Almond dan Verba menekankan bahwa budaya politik yang sehat ditopang oleh keterlibatan warga negara dalam berbagai bentuk partisipasi yang memungkinkan mereka menyalurkan aspirasi dan nilai-nilai politiknya. Dalam hal ini, PUI berfungsi sebagai wahana kolektif bagi umat Islam di Jawa Barat untuk mengekspresikan kepentingan politik mereka secara terorganisir, namun tetap berada dalam koridor moral dan etika keagamaan.

Keterlibatan PUI dalam partisipasi politik nonkonvensional juga menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia memiliki karakter yang khas dan tidak sepenuhnya mengikuti model demokrasi liberal Barat. Demokrasi di tingkat lokal sering kali dibentuk oleh interaksi antara struktur formal negara dan struktur sosial-keagamaan yang hidup di masyarakat. PUI, sebagai ormas Islam, memainkan peran penting dalam membentuk jembatan antara kedua struktur tersebut. Melalui aktivitas dakwah dan pendidikan, PUI membentuk kesadaran politik umat yang tidak selalu diekspresikan dalam bentuk dukungan elektoral,

tetapi tercermin dalam sikap, nilai, dan orientasi politik masyarakat terhadap kebijakan publik.

Peran PUI dalam demokrasi lokal juga menunjukkan bahwa agama tidak selalu menjadi sumber konflik dalam politik, sebagaimana sering diasumsikan dalam sebagian literatur politik modern. Sebaliknya, dalam konteks tertentu, agama justru dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang memperkuat etika politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. PUI, melalui pendekatan dakwah yang moderat dan berbasis pendidikan, berupaya menanamkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kepedulian sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa relasi antara agama dan demokrasi tidak selalu bersifat antagonistik, melainkan dapat bersifat komplementer.

Dalam praktiknya, pengaruh PUI terhadap kebijakan politik daerah tidak selalu bersifat langsung dan mudah diukur. Pengaruh tersebut sering kali bersifat gradual dan terakumulasi melalui proses sosial yang panjang. Misalnya, pandangan PUI mengenai pentingnya pendidikan Islam yang berkualitas dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan lembaga pendidikan keagamaan. Demikian pula, sikap PUI terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, moralitas publik, dan kesejahteraan umat dapat membentuk agenda kebijakan pemerintah secara tidak langsung. Proses ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik tidak selalu bekerja melalui keputusan formal, tetapi juga melalui pembentukan wacana dan preferensi kebijakan.

Dengan demikian, kiprah PUI memperlihatkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh mekanisme formal seperti pemilihan umum, peraturan daerah, atau struktur birokrasi, tetapi juga oleh aktor sosial-keagamaan yang beroperasi di ruang nonformal. Ormas Islam seperti PUI menjadi bagian integral dari ekosistem politik lokal yang memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dan diterima oleh masyarakat. Keberadaan aktor-aktor nonformal ini menegaskan bahwa studi politik lokal di Indonesia harus memperhatikan dimensi sosial, kultural, dan keagamaan agar dapat memahami dinamika kekuasaan secara utuh.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PUI memainkan peran strategis sebagai aktor politik nonformal dalam demokrasi lokal Jawa Barat. Melalui *soft power* yang berbasis legitimasi moral, modal sosial, dan jaringan pendidikan-dakwah, PUI mampu memengaruhi arah kebijakan politik tanpa harus terlibat langsung dalam politik elektoral. Peran ini menegaskan pentingnya masyarakat sipil keagamaan dalam sistem demokrasi Indonesia dan menunjukkan bahwa kekuasaan politik tidak hanya dimonopoli oleh negara, tetapi juga didistribusikan melalui aktor-aktor sosial yang memiliki kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUI menjalankan peran politiknya melalui jalur nonformal. PUI tidak terlibat langsung dalam politik elektoral, tetapi memengaruhi kebijakan publik melalui advokasi moral dan komunikasi politik. Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimiliki PUI lebih bersifat *soft power*. Nye

(2004) mendefinisikan soft power sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments*” (p. 5).

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, PUI menjalankan fungsi kontrol dan mediasi antara masyarakat dan negara. Putnam (1993) menegaskan bahwa “*networks of civic engagement foster norms of reciprocity and trust*” (p. 171). Jaringan pendidikan dan dakwah PUI menjadi modal sosial yang memperkuat posisi tawarnya dalam relasi dengan pemerintah daerah.

Dari perspektif partisipasi politik, peran PUI mencerminkan apa yang disebut Almond dan Verba (1963) sebagai *non-conventional political participation*, di mana masyarakat terlibat dalam politik melalui organisasi sosial dan keagamaan. Dengan demikian, kiprah PUI memperlihatkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh aktor sosial keagamaan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa Ormas Islam PUI memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan politik di Jawa Barat melalui mekanisme nonformal. Dengan legitimasi moral, jaringan sosial, dan komunikasi politik, PUI berfungsi sebagai aktor masyarakat sipil yang berkontribusi pada proses demokrasi lokal. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa ormas keagamaan merupakan elemen penting dalam tata kelola politik demokratis di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture*. Princeton University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work*. Princeton University Press.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Gramedia.
- Tocqueville, A. de. (2000). *Democracy in America*. University of Chicago Press. (Original work published 1835)
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications*. Sage.